**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP RUMAH
DI BANTARAN SUNGAI DESA TELUK NILAP KECAMATAN
KUBU BABUSSALAM**

Oleh : Hafis

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Zulwisman, SH.,MH

Alamat : Jl. Merak Sakti, per. bina lindung, no 4, Pekanbaru

Email : hafis121999@gmail.com Telepon : 0853-6390-1203

ABSTRACT

One of the Regional Regulations which is a public policy related to controlling house buildings on the banks of the river is the Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order. The conditions seen in the field are that the implementation needs to be carried out firmly by the Regional Government. The establishment of the Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order departs from the problems that occur in Rokan Hilir Regency, namely that there are still many residents who build houses on the banks of the river, which is actually contrary to the Regional Regulation. Therefore, the purpose of this study is, firstly, to determine the implementation of the Rokan Hilir District Regulation Number 3 of 2014, secondly to determine the inhibiting factors, and thirdly to determine the efforts to overcome houses on the riverbanks of Teluk Nilap Village, Kubu Babussalam District.

This research uses sociological juridical research. The research location is in Teluk Nilap Village, Kubu Babussalam District, namely the Regional House of Representatives of Rokan Hilir Regency, the Civil Service Police Unit of Rokan Hilir Regency and the Teluk Nilap Village Office, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. This study used data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques were carried out by interviews, observations, and questionnaires.

From this research, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of the Rokan Hilir District Regulation Number 3 of 2014 concerning public order, especially Article 18 paragraph 1, has not been carried out properly. This is because the Regional Regulation of Rokan Hilir Regency No. 3 of 2014 concerning public order has not been socialized to the people who live on the riverbanks of Teluk Nilap Village. Second, the inhibiting actor in the implementation of the Rokan Hilir District Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in Teluk Nilap Village is due to legal factors, law enforcement, legal culture, budget, legal socialization, lack of human resources (HR) in the district Satpol PP work environment. Downstream. Third, future efforts that can be made towards the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order are by controlling houses on the riverbanks of Teluk Nilap Village, providing socialization, and improving facilities and infrastructure in an effort to implement Regional Regulation Number 3 of 2014 about public order.

Keywords: Implementation - Public Order - Riverbanks

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di dalam wilayah Provinsi Riau, juga merupakan sebuah daerah otonom yang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat membuat suatu produk hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini ada sebanyak kurang lebih 170 peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir¹. Salah satu peraturan daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan hidup yang serasi, nyaman, tertib, teratur, harmonis, dan tentram bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mendirikan rumah yang menjadi hak setiap masyarakat. Dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal yang layak dan sehat sehingga aktifitas dalam kehidupan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik, aman, dan tentram.

Dalam membangun rumah harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan keteraturan. Idealnya rumah yang dibangun harus berada dalam kawasan atau tempat yang khusus di peruntukan bagi perumahan dan pemukiman, maka hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan yang berpotensi berbahaya bagi orang maupun barang dengan tujuan agar terciptanya keamanan dalam mendirikan rumah.

Desa Teluk Nilap mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 8.132 ribu. Dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang berada

di Desa Teluk Nilap membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas untuk memilih bertempat tinggal dengan cara mendirikan bangunan rumah di bantaran sungai.

Keberadaan rumah di bantaran sungai yang ada di Desa Teluk Nilap ini merupakan bangunan yang tidak memiliki izin yang di bangun oleh masyarakat di bantaran sungai. Jumlah rumah di bantaran sungai yang berada di Desa Teluk Nilap berjumlah 149 rumah.² Masyarakat membangun rumah tersebut di atas tanah yang bukan hak miliknya, melainkan merupakan tanah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diperuntukan sebagai jalan Kabupaten. Jumlah rumah di bantaran sungai yang ada dapat dilihat dari tabel berikut.³

Tabel 1.1

**Jumlah Rumah Yang Berada di
Desa Teluk Nilap**

Klasifikasi	Jumlah
Rumah Secara Keseluruhan	1.619
Rumah di bantaran sungai	149

Sumber: Kantor Desa Teluk Nilap

Persoalan rumah ini jelas bertentangan dengan salah satu pasal terkait larangan bertempat tinggal di tanggul, pinggir kali selokan, maupun bantaran sungai. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali selokan.”⁴ Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 sesuai dan mengacu pada kerangka fikir yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menjelaskan bahwa:⁵

1. Pasal 139 yang berbunyi “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan

² Wawancara dengan Bapak H Gamal Bacik SE, Kepala Desa Teluk Nilap, Hari senin 26 Oktober 2020, Bertempat di Kantor Desa Teluk Nilap.

³ Wawancara dengan Bapak H. Gamal Bacik SE, Kepala Desa Teluk Nilap, Hari Senin 26 Oktober 2020, Bertempat di Kantor Desa Teluk Nilap.

⁴ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.

⁵ Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

¹<http://jdih.rohilkab.go.id/peraturan/1/peraturan-daerah.html> diakses, tanggal 23 November 2020.

yang khusus di peruntukan bagi perumahan dan permukiman”

2. Pasal 140 yang berbunyi “Setiap orang dilarang membangun, perumahan dan/atau permukiman ditempat yang berpotensi berbahaya bagi barang ataupun orang”

Rumah yang didirikan oleh masyarakat dianggap ilegal, karena dalam pembangunannya para pemilik rumah membangun bangunan rumahnya di ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. persoalan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyebabkan tercemarnya air sungai, karena rumah yang didirikan masyarakat tidak memiliki pembuangan air besar, dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai langsung membuang air besarnya ke sungai. Kemudian pengelolaan dan pembuangan sampah juga menjadi permasalahan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sebab masyarakat tersebut akan membuang limbah sampahnya langsung ke sungai. Dari aktifitas tersebut dampak negatif yang paling utama ialah sungai akan menjadi tercemar dan menjadi sumber penyakit yang akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.⁶

Permasalahan yang timbul dari keberadaan rumah di bantaran sungai ini tidak bisa dianggap ringan dan harus mendapatkan perhatian penuh. Karena persoalan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyebabkan tercemarnya air sungai, karena rumah yang didirikan masyarakat tidak memiliki pembuangan air besar, dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai langsung membuang air besarnya ke sungai. Kemudian pengelolaan dan pembuangan sampah juga menjadi permasalahan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sebab masyarakat tersebut akan membuang limbah sampahnya langsung ke sungai. Dari aktifitas tersebut dampak negatif yang paling utama ialah sungai akan menjadi tercemar dan menjadi sumber

penyakit yang akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian masalah yang Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di paparkan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Ketertiban Umum terhadap keberadaan rumah di bantaran sungai. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP RUMAH DI BANTARAN SUNGAI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap rumah di bantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam ?
2. Apa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap rumah di bantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi rumah di bantaran sungai Desa Teluk Nilap demi tercapainya ketertiban umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap rumah di bantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap rumah di bantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi di bantaran sungai Desa

⁶ Wawancara dengan Bapak Suryadi SE, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Hari Selasa 3 November 2020, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

⁷ Wawancara dengan Bapak Suryadi SE, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Hari Selasa 3 November 2020, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya di bidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, sebagai bahan evaluasi terkait kinerja yang berdampak besar bagi masyarakat maupun Negara

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di artikan sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial.

Di bidang Politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Bidang Ekonomi, otonomi daerah menjamin kancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan terbuka peluang untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Pengelolaan otonomi daerah harus

dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial dan nilai-nilai lokal yang di pandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merepson dinamika kehidupan.⁹

Inti dari konsep otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan di capai dan menghindari permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah secara luas dan dengan tidak mengabaikan kelangsungan pelayanan umum, dan memelihara keseimbangan fiskal secara nasional.¹⁰

Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi pemerintahan daerah atau lembaga administrasi saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat, badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Melalui otonomi peluang bermitra terbuka kepada pemerintah daerah dengan publik dan pihak swasta dalam berbagai bidang.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas-lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, melainkan suatu tindakan yang dapat menerapkan hukum terhadap suatu kejadian sehingga dapat di ibaratkan menarik garis lurus dari dua titik.¹²

Penegakan hukum harus dijadikan sebagai upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku yang dilakukan dalam setiap perbuatan hukum itu sendiri, baik oleh subjek hukum itu sendiri maupun aparaturnya penegak hukum yang diamanatkan oleh undang-undang untuk

⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ H. Syaikani, *et. al.*, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 173.

¹⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 3.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tanggal 15 Desember 2020.

¹² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm.190.

menjalankan tugas dan kewenangan agar berfungsinya norma-norma hukum dalam berperilaku sebagai warga negara.

3. Teori Pengawasan

Defenisi pengawasan menurut sarwoto adalah sebagai manajemen kegiatan yang mengusahakan pekerjaan agar suatu pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan pelaksanaan yang ditetapkan dan hasil yang di kehendaki.¹³

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu kegiatan tugas dan pelaksanaan secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan telah sesuai dengan kerangka yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terdapat kegiatan yang bersifat kolektif atau pengarah.¹⁴ Jadi pengawasan sangat penting dan sangat di butuhkan karena untuk mencegah dan menghindari kelalaian yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu perlunya ada pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah di rencanakan oleh pemerintah.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Pertemuan kedua hal ini bermaksud mencari dari bentuk tentang hal yang telah disepakati dulu.¹⁵
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota tentang pengaturan ketertiban umum.¹⁶
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal.¹⁷
4. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau

¹³ Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1998, hlm.18.

¹⁴ Muchsan, *pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintahana dan peradilan tata usaha negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.

¹⁵ Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 441.

¹⁶ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

kanan palung sungai.¹⁸

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kelapa Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Desa Teluk Nilap.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Desa Teluk Nilap

b. Sampel

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa Teluk Nila dan pemilik bangunan/rumah sebanyak 75 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 30.

- a. Wawancara.
- b. Observasi
- c. Kuisisioner.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.²¹

2. Asas Keamanan dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.²²

3. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Ketentraman artinya keamanan, ketenangan pikiran. Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Rumah di Bantaran Sungai

1. Pengertian Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.²⁴ Sungai juga bisa diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir.

2. Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Pemerintah memperhatikan manfaatnya sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.

3. Air Sungai

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia.

²¹ Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 3. 2016.

²² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Kualitas air sungai dapat diamati dengan melihat status mutu air. Status mutu air menunjukkan tingkat kondisi mutu air sumber air dalam kondisi tercemar atau kondisi baik dengan membandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

4. Pengertian Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.²⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, disebutkan bahwa bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam

Asal mula pemberian nama Teluk Nilap ini bermula dari nama seorang perempuan yang bernama Nilap yang tinggal di Teluk Sungai Kubu. Pada tahun 1916, awalnya kawasan Teluk Nilap dibuka oleh beberapa orang yang tujuannya membuka ladang untuk menanam padi setelah beberapa tahun berjalan maka daerah tersebut semakin berkembang dan menjadi kawasan perkampungan yang dinamakan Desa Teluk Nilap.²⁶

Desa Teluk Nilap merupakan bagian dari wilayah Sungai Sirih yang sudah dibuka jauh sebelum kawasan Teluk Nilap berdiri. Kawasan Teluk Nilap pada awalnya sampai ke daerah Simpang Kanan dan pada Tahun 1990 Simpang Kanan dimekarkan dan sekarang sudah menjadi satu Kecamatan. Dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Desa Teluk Nilap, Kepala Desa mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya, dalam hal keamanan dan ketertiban Desa, Kepala Desa mengadakan koordinasi dengan

Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap Rumah di Bantaran Sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussala

Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi diartikan sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁷ Implementasi Peraturan Daerah pada prinsipnya adalah cara agar sebuah Peraturan Daerah dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk dapat berjalannya Peraturan Daerah, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi peraturan *derivate* atau turunan dari peraturan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Implementasi dari pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum masih belum terlaksana dengan baik. Berikut Kuisisioner yang telah disebarkan ke masyarakat yang Bertempat tinggal di bantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam:

²⁵ Mulyandari Hestin, "Upaya Pengelolaan Lahan Bangunan Pada Bantaran Sungai Berbasis Lingkungan di Kabupaten Sleman DIY", *Skripsi*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Nilap,_Kubu,_Rokan_Hilir diakses pada 7 juli 2021

²⁷ Afan Gaffar, *Implementasi Peraturan Daerah*, Binacipta, Bandung, 2009, hlm. 295.

Tabel 4.1
Data Jawaban Responden terkait Rumah di
Bantaran Sungai Desa Teluk Nilap
Kecamatan Kubu Babussalam

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		%
		Ya	Tidak	
1	Apakah anda mengetahui peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum?	6	69	100 %
2	Apakah anda mengetahui apa itu ketertiban umum?	40	35	100 %
3	Apakah anda mengetahui adanya aturan larangan mendirikan rumah/bangunan di bantaran sungai?	54	21	100 %
Jumlah		100	125	-

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 31 Mei 2021

Implementasi tidak berjalan yaitu ketidak tahuan masyarakat dimana pendiri rumah di bantaran sungai hanya terbatas pada peraturan daerah yang mengatur secara spesipik tentang larangan untuk bertempat tinggal ditanggul maupun di bantaran sungai. Sedangkan pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa mendirikan bangunan dibantaran sungai adalah suatu hal yang salah, karena paling tidaknya limbah rumah tangga yang dihasilkan dari tiap-tiap rumah dapat mencemari air sungai.

Tabel 4.2
Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi
Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
Umum Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah Daerah

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Ya	3	4%
2.	Tidak	72	96%
Jumlah		75	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 31 Mei 2021

Hal lain yang menyebabkan tidak berjalannya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 yakni tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014. Pemeringah Daerah belum menjalankan tugasnya dalam memberikan sosialisasi terkait Peraturan Daerah ini. Seharusnya hal ini menjadi kewenangan dari Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 254 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah”.²⁸

B. Faktor yang Menghambat Implementasi Peratuan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 terhadap Rumah di Bantaran Sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam

1. Faktor Hukum

Pemerintah dinilai belum tegas dalam hal ini dikarenakan belum mengatur sanksi yang menjadi bukti ketegasan atas penegakan terhadap Peraturan Derah Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang melarang masyarakat untuk bertempat tinggal dan tidur di bantaran sungai Desa Teluk Nilap.

Dalam Peraturan Darah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2104 Tentang Ketertiban umum tidak menjelaskan lebih mendalam terkait larangan mendirikan rumah dibantaran sungai, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali selokan.”²⁹ Bunyi aturan dalam pasal 18 ayat 1 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ini menimbulkan multi tafsir yang menyebabkan masyarakat tidak memahami dengan baik isi dari pasal tersebut.

²⁸ Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.

Hal ini dikarenakan isi dari pasal tidak menjelaskan dengan detail maksud dari pasal tersebut. Di dalam pasal hanya di jelaskan mengenai masyarakat yang tidak boleh tinggal dan tidur di bantaran sungai, namun tidak dijelaskan tafsir mengenai tinggal dan tidur di sini dengan minimal berapa lama, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui apa maksud dari pasal tersebut. Tempat tinggal dan tidur menjadi keterangan yang belum tuntas karena tidak menjelaskan keterangan minimal waktu tinggal dan tidur.

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum juga tidak mengatur terkait sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar apabila ada yang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali ataupun selokan sesuai dengan keharusan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁰

Kendala yang terjadi dilapangan yakni tidak pernah adanya penertiban terhadap masyarakat yang mendirikan rumah sebagai bukti bertempat tinggal atau menetap di bantaran sungai Desa Teluk Nilap. Tidak adanya penertiban oleh Satpol PP ini dibuktikan dengan tidak pernah adanya laporan dari Kepala Desa maupun masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa Kepala Desa Teluk Nilap tidak pernah melaporkan mengenai permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Desa teluk Nilap. Hal inipun di benarkan oleh Kepala Desa Teluk Nilap, yang menjelaskan memang tidak pernah terjadi kerusakan yang dialami oleh

masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Desa Teluk Nilap.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.³¹

Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.³²

Faktor penegak hukum menjadi penghambat implementasi dari peraturan daerah karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum. Hal ini menjadi kendala karena Satpol PP sebagai penegak hukum yang dalam hal ini ialah peraturan daerah sangat berperan untuk tegak atau tidak nya suatu peraturan daerah. Faktor budaya hukum yang terjadi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap rumah dibantaran sungai Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu

30 Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8 No.3 September 2008

31 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumi, Bandung, 1986, hlm.11

32 Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 96.

Babussalam terhambat kendala dari masyarakat itu sendiri yang menjadi bagian dari permasalahan dan kendala yang sangat sering dijumpai di lapangan. Dimana masyarakat belum dapat menegakkan hukum dikarenakan hukum itu sendiri.

Perilaku hukum yang terlihat di masyarakat Desa teluk Nilap yang berada di bantaran sungai hanya sebatas melihat hukum dari segi ada atau tidaknya aparat penegak hukum. Satpol PP dipahami masyarakat sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya mengakan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat hanya akan patuh dan taat menegakkan hukum apabila terdapat aparat penegak hukum yakni Satpol PP yang ada di lapangan. Dalam artian bahwa, masyarakat akan patuh terhadap hukum apabila Satpol PP benar-benar terjun kemasyarakat terutama masyarakat di bantaran sungai desa teluk nilap. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Teluk Nilap yang mengatakan bahwa masyarakat mau berpindah dari bantaran sungai apabila pemerintah benar-benar terjun dan memberikan solusi dari permasalahan yang menyebabkan penegakan hukum belum dapat dilaksanakan.

4. Faktor Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.³³ Anggaran merupakan penunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan.

Dalam melakukan penertiban yang ada di lapangan, Satpol PP harus memiliki anggaran yang memadai, apabila sumber dana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir tidak ada atau tidak memadai maka akan sulit untuk menjalan tugasnya dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggaran rumah dibantaran sungai Desa Teluk Nilap.

Anggaran menjadi kendala dalam melakukan penertiban rumah yang berada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap, namun dengan adanya data anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terbantahkan dikarenakan besarnya anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir. Seharusnya dengan adanya anggaran sebesar itu Satpol PP dapat melakukan penertiban terhadap rumah yang berada di Desa Teluk Nilap agar terciptanya ketertiban umum bagi masyarakat Rokan Hilir Khususnya masyarakat Desa Teluk Nilap.

Tabel 4.3

Jumlah Anggaran Pendataan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah Pendapatan	0
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16.594.099.919
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	846.933.899
01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	775.378.680
	Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	253.350.250
	Belanja Oprasi	253.350.250
02	Belanja Barang dan Jasa	253.350.250
	Peneingkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	122.028.430
03	Belanja Barang dan Jasa	122.028.430
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	400.000.000
	Belanja Oprasional	400.000.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabipaten Rokan Hilir

³³ Munandar, *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta: BPFE

5. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.³⁴

Dalam permasalahan rumah yang berada di bantaran sungai Pemerintah Daerah belum menjalankan tugasnya dalam memberikan sosialisasi terkait Peraturan Daerah ini. Seharusnya hal ini menjadi kewenangan dari Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 254 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah”.³⁵

Berdasarkan kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti bahwa mengenai sosialisasi kepada masyarakat :

Tabel 4.4

Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Ya	3	4%
2.	Tidak	72	96%
Jumlah		75	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 31 Mei 2021

Dari hasil kuisisioner di atas mengenai sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dari 75 orang responden masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai didapatkan hasil sebanyak 3 orang mengatakan pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah sedangkan selebihnya mengatakan tidak pernah ada sosialisasi. Ini artinya bahwa tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kerja Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir

Kurangnya PPNS dilingkungan

Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir menjadi kendala dan faktor terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan perlunya dilakukan penambahan jumlah PPNS di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya penambahan PPNS tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketertiban umum khususnya permasalahan rumah yang berada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap.

Kurangnya PPNS ini mejadi salah satu kesulitan yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, karena dalam melakuakn penertiban dilapangan harus didampingi oleh PPNS. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suryadi SE kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, mengatakan bahwa Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir hanya memiliki 2 PPNS dan ini menjadi kendala kami dalam melakukan penertiban di tengah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terutama dalam permasalahan ketertiban umum.³⁶ Kurangnya jumlah PPNS di lingkungan kerja Satpol PP juga didukung dengan adanya data Pelatihan teknis yang mana pada tahun 2019 hanya ada 1 diklat dilingkungan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan dapat dilihat dari data berikut:

Kurangnya jumlah PPNS di lingkungan kerja Satpol PP juga didukung dengan adanya data Pelatihan teknis yang mana pada tahun 2019 hanya ada 1 diklat dilingkungan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan dapat dilihat dari data berikut:

³⁴ Vander Zanden W.J., *Sociology*. New York:John Wiley and Sons. Hal. 75

³⁵ Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

³⁶ Wawancara dengan Bapak Suryadi SE, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Hari Selasa 3 November 2020, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 4.5
Data Pelatihan Teknis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis	Jumlah
1	Diklatsar	25
2	Pelatihan Intel	-
3	Pelatihan Provos/PTI	-
4	Pelatihan Menembak	-
5	Pelatihan Bela Diri	-
6	Diklat Pelatihan (TOT)	-
7	Diklat PPNS	1
8	Fungsional Satpol PP	8
Total		34

Sumber: Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir

Dari hasil wawancara dan data di atas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya PPNS di lingkungan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir menjadi kendala dan faktor terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan perlunya dilakukan penambahan jumlah PPNS di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya penambahan PPNS tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketertiban umum khususnya permasalahan rumah yang berada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap.

C. Upaya dalam Mengatasi Rumah di Bantaran Sungai Desa Teluk Nilap Demi Tercapainya Ketertiban Umum

1. Melakukan Penertiban

Penertiban menjadi tahapan kegiatan yang di harapkan dapat dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan rumah yang ada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap. Penertiban sendiri diartikan sebagai sesuatu yang tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.³⁷ Penertiban dilakukan bertujuan untuk mewujudkan koordinasi negara atau daerah yang aman, tertib dan tentram dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat agar dapat berlangsung kondusif.³⁸ Dalam melakukan penertiban tentu memerlukan aturan hukum atau Peraturan Daerah yang jelas untuk di tegakkan di tengah masyarakat.

Dalam melakukan penertiban tentu memerlukan aturan hukum atau Peraturan Daerah yang jelas untuk di tegakkan di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Teluk Nilap, mengatakan bahwa DPRD selaku instansi yang berwenang membuat aturan hukum atau Peraturan Daerah harus menyusun Peraturan Daerah dengan sedetail mungkin mulai dari dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemberian sanksi yang seharusnya sesuai di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum sehingga dalam penertiban Peraturan Daerah Satpol PP dan Kepala Desa dapat bertindak tegas untuk memberikan sanksi apa yang seharusnya dilakukan.³⁹

2. Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat

Adapun Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, maka masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Desa Teluk Nilap dapat memahami dan mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat menambah pengetahuan dari masyarakat untuk patuh dan taat kepada aturan yang ada dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Salah satu upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang dapat dilakukan adalah menambahkan jumlah personil Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satpol PP

³⁸ <https://sinta.unud.ac.ad/> diakses, 10 juli 2021.

³⁹ Wawancara dengan Bapak H. Gamal Bacik, SE, Kepala Desa Teluk Nilap, Hari Senin 26 Oktober 2020, Bertempat di Kantor Desa Teluk Nilap.

³⁷ *Ibid*

Rokan Hilir dijelaskan bahwa Kepala Satpol PP sudah mengajukan rancangan untuk menambah jumlah pegawai kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Satpol PP dapat berupaya meminta penambahan jumlah pegawai, karena dengan beban kerja yang begitu banyaknya dan tidak diimbangi dengan jumlah personil, tentu hal tersebut akan menjadikan tidak optimalnya kinerja dari Satpol PP itu sendiri dalam hal menjaga asset daerah dan melakukan penegakan hukum dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Pemerintah harus berani dalam melakukan pegawai dan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja dari Satpol PP guna memaksimalkan tugas-tugas dan fungsi yang ada di Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat terutama masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai desa Teluk Nilap.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum khususnya pasal 18 ayat 1 belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan belum disosialisasikannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum kepada masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Desa Teluk Nilap. Selanjutnya masih banyak masyarakat yang mendirikan dan bertempat tinggal dibantaran sungai sehingga tidak terlaksana dengan sepenuhnya Peraturan Daerah dengan baik.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaetn Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban Umum di Desa Teluk Nilap adalah karena Faktor Hukum, Penegakan Hukum, Budaya Hukum, Anggaran, Sosialisasi Hukum, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kerja Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir.
3. Upaya Kedepan yang dapat dilakukan terhadap rumah yang ada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum adalah dengan cara melakukan penertiban terhadap rumah yang berada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap, pemberian sosialisasi mengenai pentingnya hukum untuk di patuhi, serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap rumah liar di bantara sungai Desa Teluk Nilap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Perlu adanya komunikasi antara warga yang mendirikan bangunan rumah di bantaran sungai dengan Pemerintah Desa Teluk Nilap dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan serta perlu memberikan tindakan yang tegas apabila masih mendapati warga yang masih melanggar.
2. Perlu adanya evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang membahas Tentang Ketertiban Umum Agar produk hukum lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar lebih tegas dalam pelaksanaan penertiban terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum terutama terhadap rumah yang berada di bantaran sungai Desa Teluk Nilap agar dapat terciptanya ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gaffar, Afan, 2009, *Implementasi Peraturan Daerah*, Binacipta, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Muchsan, 1992, *pengawasan terhadap perbuatan apatar pemerintahana dan peradilan tata usaha*

- negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Munandar, 2010, *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, BPFE, Yogyakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Syaukani, H, 2007, *et. al., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja, Haw, 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali Pers, Jakarta
- B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah**
- Mulyandari Hestin, 2011, "Upaya Pengelolaan Lahan Bangunan Pada Bantaran Sungai Berbasis Lingkungan di Kabupaten Sleman DIY", *Skripsi*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, Yogyakarta.
- Sanyoto, 2008 "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*,
- Victor Imanuel W. Nalle, 2006, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Hukum & Pembangunan*,
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Naegara Republik Indonesia Nomor 468
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembar Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 5188
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3
- E. Website**
- <https://sinta.unud.ac.ad/> diakses, 10 juli 2021
- <http://jdih.rohilkab.go.id/peraturan/1/peraturan-daerah.html> diakses, tanggal 23 November 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Nilap,_Kubu,_Rokan_Hilir diakses pada 7 juli 2021